

KINERJA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI YOGYAKARTA

Yopi Saleh¹, Chris Sugihono¹, dan Vyta W. Hanifah²

¹Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
Komplek Pertanian Kusu No. 1, Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
² Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar 10 Bogor
Email : yopisaleh@gmail.com

Diterima: 27 Juli 2013; Disetujui untuk publikasi: 22 Oktober 2013

ABSTRACT

Performance on Microfinance Institution of Agribusiness in Bantul District Yogyakarta Province.

Microfinance Institutions of Agriculture (MIA) has a role in facilitating agricultural financing that grows and develops from the community with a various management. The objective of this study was to determine the performance of the MIA of Rural Agribusiness Development Program (RADP) based on predefined indicators. The study was conducted in March-June 2012 involving 65 MIA-RADP in Bantul district. Primary data were collected through direct interviews using questionnaires with one or all of the board in each of the MIA-RADP. The financial reports in December 2011 used as secondary data. Research approach used the monitoring and evaluation of the scoring method followed by test parameters proportion. The results showed that the performance of the MIA-RADP 2008, 2009 and 2010 in Bantul were fair categorized with improved performance. Increasing the number of clients and a loan portfolio, and also decreasing the levels of NPLs proved this. The results of proportion parameter test showed that there was less than 50% MIA in Bantul district has good performance; the others were in poor and fair category. MIA that worthy as a pilot project is MIA Imogiri stand since 2010. Two approaches to increase the performance of MIA-RADP are: (1) Internal approach that focus on human resource development programs and (2) External approach, that focus on client awareness and optimizing the government role.

Keywords : *Performance, indicators, MIA, RADP*

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) berperan memfasilitasi pembiayaan pertanian yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan berbagai macam tipe dan pola pengelolaan. Tujuan pengkajian untuk menganalisis kinerja LKM-A Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan pada 65 LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul pada bulan Maret-Juni 2012. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan kuisioner dengan pengurus LKM-A PUAP. Data sekunder ditelusuri dari laporan kegiatan LKM-A per Desember 2011. Analisis data menggunakan metode skoring dan uji parameter proporsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) kinerja LKM-A PUAP tahun 2008, 2009 dan 2010 di Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori cukup baik dengan penilaian kinerja yang meningkat, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah nasabah dan penyaluran kredit serta menurunnya tingkat *Non Personal Loan* (NPL), (2) proporsi LKM-A yang memiliki kinerja baik target < 50 persen, selebihnya termasuk kategori cukup dan kurang baik. Upaya untuk meningkatkan kinerja LKM-A PUAP perlu dilakukan dengan pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internal terkait dengan peningkatan SDM pengurus LKM-A yang handal, dan eksternal pada penumbuhan kesadaran nasabah dan optimalisasi peran pemerintah.

Kata kunci : *Kinerja, indikator, LKM-A, PUAP*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berperan memfasilitasi pembiayaan pertanian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan berbagai macam tipe dan pola pengelolaan. Dikembangkannya LKM-A di perdesaan dilandasi oleh: (1) kemudahan akses; (2) proses yang cepat; (3) prosedur sederhana; (4) mengikuti *sosio culture* setempat dan dekat dengan lokasi usaha; (5) pengelola LKM-A tahu karakter petani (nasabah); dan (6) adanya dana/aset yang ditangani oleh kelompok (Kementan, 2010). Meskipun demikian, dalam prakteknya kinerja organisasi tersebut beragam, bahkan cenderung rendah. Indikatornya terutama dilihat dari aspek: (1) tingkat pelunasan kredit yang rendah; (2) rendahnya moralitas aparat pelaksana; dan (3) tingkat mobilisasi dana masyarakat yang lamban (Martowijoyo, 2002). Konsekuensi dari kelemahan itu akan menghambat keberlanjutan LKM. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen secara periodik dengan metode yang tepat, secara profesional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, LKM berperan besar memacu pertumbuhan ekonomi (Ashari, 2006). Faktor kritis pengembangan LKM di sektor pertanian menurut Hendayana (2007) terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan *seed capital*, kelayakan ekonomi usahatani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan LKM. Terlebih lagi dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM yang mengharuskan legalitas LKM mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan memunculkan kekhawatiran yang akan menghambat perkembangan LKM. Persoalannya adalah bagaimanakah efektivitas kinerja LKM dalam mendukung agribisnis di perdesaan. Makalah ini bertujuan untuk: (1) menggali informasi kinerja LKM-A yang diinisiasi PUAP di Kabupaten Bantul, dan (2) merumuskan strategi peningkatan kinerja LKM-A yang efektif dalam

menjalankan fungsi dan perannya memfasilitasi pembiayaan pertanian.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Pengukuran kinerja adalah evaluasi hasil dari suatu organisasi sebagai akibat dari keputusan manajemen pada sumber daya di organisasi tersebut dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota organisasi (Hofer, 1983). Pendekatan sistem monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja suatu program pemerintah.

Sistem monitoring didefinisikan sebagai suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan program/proyek terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut diperuntukkan bagi manajemen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) suatu program/proyek yang sedang berjalan (Widyanti dan Sudarno, 2007).

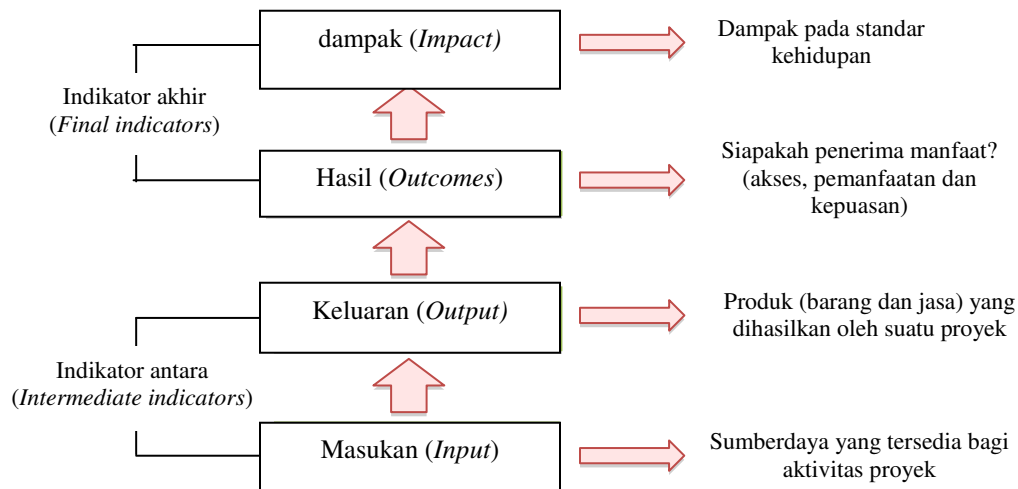
Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Suryahadi, 2007).

Monitoring dan evaluasi pada LKM-A PUAP bermanfaat dalam memberikan informasi kinerja kelembagaan tersebut dan menjadi pertimbangan menentukan langkah selanjutnya demi keberlangsungan program. Secara konseptual, monitoring dan evaluasi ditampilkan pada Gambar 1. Masukan (*input*) berupa sumber daya, seperti sumber daya manusia, finansial, dan sarana-sarana fisik lainnya, merupakan prasyarat pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan keluaran (*output*) berupa barang dan jasa. Untuk melihat kecukupan

masukan dan volume hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan diperlukan ukuran, yaitu indikator, yang pada kedua tahapan/fase ini menggunakan indikator antara (*intermediate indicators*). Dari rangkaian proses tersebut, diperoleh hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*) yang pada umumnya dapat dilihat setelah kurun waktu tertentu tergantung dari jenis proyek. Untuk mengukur dua elemen terakhir tersebut digunakan indikator akhir (*final indicators*) (Widyanti dan Sudarno, 2007). Ashari (2006) menambahkan indikator kinerja LKM dengan jumlah kredit yang disalurkan maupun jumlah dana yang berhasil dihimpun.

Penentuan LKM-A contoh dilakukan secara sengaja didasarkan tahun berdirinya organisasi tersebut. Unit analisis adalah satuan organisasi yang diwakili oleh pengurus LKM-A. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas unsur-unsur kinerja yang meliputi input, proses, output, outcome dan dampak. Data sekunder adalah laporan administrasi keuangan LKM-A dan perkembangannya.

Pengukuran kinerja dinilai berdasarkan indikator input (6 kriteria), proses (11 kriteria), *output*, *outcome* (hasil), dan dampak (*impact*) masing-masing 4 kriteria, 3 kriteria, dan 4 kriteria. Setiap aspek tersebut diberi skor mengikuti cara Pusat Pembiayaan (2010). Secara rinci skor dalam penilaian setiap aspek tersebut disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1. Kerangka kerja konseptual sistem monitoring dan evaluasi
(Sumber: World Bank, 2003 dalam Widyanti dan Sudarno, 2007)

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada Maret-Juni 2012 di Kabupaten Bantul sebagai penerima BLM-PUAP periode 2008-2010. Penelitian melibatkan LKM-A periode 2008, 2009, dan 2010 masing-masing 25 unit, 23 unit dan 17 unit.

Skor penilaian kategori untuk ketiga indikator kinerja, ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Indikator kinerja LKM-A PUAP dan panduan skor maksimum

Indikator Kinerja	Kriteria	Skor Maksimum
<i>Input</i>		11
	1. Kesesuaian dana BLM PUAP	1
	2. Modal keswadayaan	3
	3. Kelengkapan AD/ART	2
	4. Badan hukum LKM-A	2
	5. Pelatihan	1
	6. Sarana dan prasarana LKM-A	2
<i>Proses</i>		24
	1. Pembinaan dan pendampingan	3
	2. Lama pengajuan	2
	3. Analisis kelayakan usaha	2
	4. Metode survey lapangan	2
	5. Pencatatan dan pembukuan	2
	6. Pengendalian penyaluran dana	2
	7. Pengawasan pembiayaan	2
	8. Pelaporan	3
	9. Mekanisme insentif dan sanksi	2
	10. Simpanan sukarela	2
	11. Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	2
<i>Output</i>		11
	1. Penyaluran pinjaman untuk usaha pertanian	3
	2. Penyaluran pinjaman kepada petani miskin	3
	3. Kumulatif penyaluran	3
	4. Tingkat pembiayaan bermasalah atau <i>Non Personal Loan</i> (NPL)	2
<i>Outcome</i>		4
	1. Sisa Hasil Usaha (SHU)	1
	2. Dana pihak ketiga	1
	3. Aset yang dikelola	2
<i>Dampak</i>		4
	1. Meningkatkan lapangan kerja	1
	2. Meningkatkan skala usaha	1
	3. Menumbuhkan usaha baru berbasis pertanian	1
	4. Menimbulkan ketergantungan	1

Sumber: Pusbiaya, 2010 (dengan penyesuaian)

Tabel 2. Skor penilaian kategori untuk setiap indikator kinerja

Aspek	Skor Maksimum	Bobot	Skor Kategori			
			Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
Input	11	20	0-6,59	6,60-8,24	8,25-9,34	9,35-11,00
Proses	24	45	0-14,39	14,40-17,99	18,00-20,39	20,40-24,00
Output	11	20	0-6,59	6,60-8,24	8,25-9,34	9,35-11,00
<i>Outcome</i>	4	7,5	0-2,39	2,40-2,99	3,00-3,39	3,40-4,00
<i>Dampak</i>	4	7,5	0-2,39	2,40-2,99	3,00-3,39	3,40-4,00
Total Kinerja	54	100	0-32,39	32,40-40,49	40,50-45,89	45,90-54,00

Setelah didapatkan kesimpulan hasil skor untuk setiap LKM-A, selanjutnya dilakukan uji parameter proporsi (Dajan, 1996) untuk menguji kesimpulan kriteria kinerja LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: P \leq 50\%$$

$$H_a: P > 50\%$$

H_0 : Diduga kurang dari atau sama dengan 50 % LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul mempunyai kinerja yang baik

H_a : Diduga lebih dari 50 % LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul mempunyai kinerja yang baik

Tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$), $n = 65$

Statistik pengujian:

$$Z_{hitung} = \frac{x/n - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1 - P_0)}{n}}}$$

x = jumlah LKM-A sampel yang mempunyai kinerja baik.

n = jumlah keseluruhan LKM-A sampel

P_0 = 50%

Kriteria Pengujian:

$Z_{hitung} > Z_{table}$: H_0 ditolak, H_a diterima

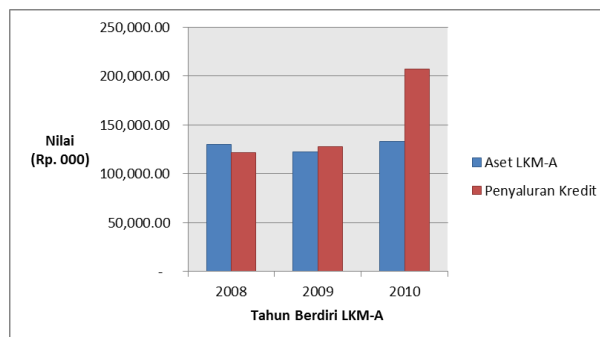
$Z_{hitung} < Z_{table}$: H_0 diterima, H_a ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan LKM-A PUAP

Di Kabupaten Bantul, Program PUAP yang dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang mensyaratkan terbentuk dan berkembangnya LKM-A di desa sasaran PUAP sebagai lembaga yang dapat membantu memfasilitasi permodalan usahatani bagi petani di perdesaan. Perbedaan latar belakang sumberdaya manusia dan kesepakatan aturan dalam operasionalisasi LKM-A di masing-masing lokasi, menyebabkan beragamnya bentuk, sistem dan pola pelaksanaan pada LKM-A

tersebut. Sistem pembiayaan yang diterapkan pada 65 unit LKM-A di Kabupaten Bantul adalah pembiayaan konvensional (89,23%) dan pembiayaan syariah (10,77%). Sedangkan untuk metode pinjamannya, sebanyak 52,31% LKM-A melaksanakan secara berkelompok. Sisanya melayani pinjaman secara individu dan campuran (individu dan kelompok).



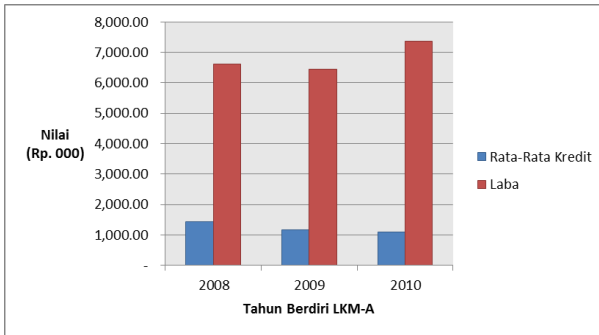
Gambar 2. Jumlah penyaluran kredit dan aset yang dimiliki LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul per Desember 2011

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai aset LKM-A tahun 2009 lebih rendah dibandingkan dengan LKM-A tahun 2008 dan 2010, hal ini dipengaruhi oleh laba LKM-A berjalan yang juga rendah (Gambar 3). Tahun 2010 LKM-A memiliki aset dan penyaluran kredit yang relatif tinggi disebabkan perputaran pinjaman yang cepat sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Adanya pedoman umum pengembangan LKM-A PUAP tahun 2010 tampaknya menjadikan pengembangan LKM-A lebih terarah. Besaran laba berpengaruh terhadap penambahan aset (Dewi, 2008).

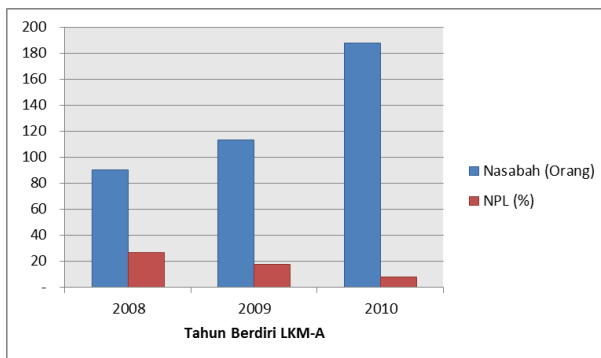
Pada tahun 2008 kinerja LKM-A relatif kurang baik ditunjukkan oleh rata-rata kredit dan tingkat NPL yang relatif lebih tinggi. Orientasi penyaluran dana pada tahun 2008 berbeda dengan orientasi penyaluran di tahun 2009 dan 2010.

LKM-A tahun 2010 memiliki rata-rata kredit relatif rendah dibandingkan dengan LKM-A sebelumnya (Gambar 3) karena jumlah nasabah yang semakin banyak. Walaupun jumlah nasabah tersebut relatif banyak, tetapi masih mampu

melakukan angsuran pinjaman tepat waktu, ditandai oleh rendahnya tingkat NPL (Gambar 4).



Gambar 3. Jumlah rata-rata kredit dan laba LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul per Desember 2011



Gambar 4. Jumlah nasabah dan tingkat NPL LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul per Desember 2011

Penilaian Kinerja LKM-A PUAP

Tujuan utama pembentukan LKM-A adalah menjadi penghubung aktivitas ekonomi masyarakat tani di perdesaan terhadap akses permodalan usahatani. Orientasi dan kebijakan program PUAP dari tahun 2008 hingga 2010 berbeda, hal ini menyebabkan perkembangan LKM-A PUAP dari tahun ke tahun juga berbeda. Kebijakan program PUAP tahun 2008 menitikberatkan pada orientasi kinerja input dengan indikator optimalisasi penyaluran dana PUAP pada usaha agribisnis budidaya (*on farm*). Tahun 2009, orientasi program sudah mengarah dan memperhatikan pentingnya proses pelaksanaan program dengan indikator penyaluran yang

diarahkan kepada usaha ekonomi produktif baik *on farm* maupun *off farm*. Pada tahun 2010, orientasi program sudah mengarah dan fokus pada hasil yang telah ditetapkan. Selain itu, pedoman umum pengembangan LKM-A diterbitkan sebagai acuan bagi persyaratan dan pelaksanaan pelayanan LKM-A mendukung pengembangan usaha agribisnis (*on farm* dan *off farm*).

Tabel 3. Hasil penilaian input LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul tahun 2012

Tahun Berdiri LKM-A	Skor	Kategori
2008	6,26	Kurang Baik
2009	7,00	Cukup Baik
2010	6,71	Cukup Baik
Total Kinerja	6,68	Cukup Baik
Interval	(6,60-8,24)	

Dari hasil penilaian kinerja LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul dengan indikator input (Tabel 3) dapat disimpulkan bahwa kinerja input LKM-A cenderung meningkat. Hal ini karena sudah ada penumbuhan modal keswadayaan (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela), kelengkapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pelatihan dan magang bagi pengelola LKM-A di lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Namun demikian, masih terdapat 73,31 % LKM-A yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kantor sekretariat, peralatan pengolahan data (komputer/laptop), printer, dan lainnya. Selain itu, status sebagian besar LKM-A (96,92%) belum berbadan hukum, padahal keberlanjutan LKM-A salah satunya dipengaruhi oleh faktor adanya payung hukum (Hermawan dan Andrianyta, 2012). Hanya terdapat dua LKM-A (3,08 %) yang berbadan hukum yaitu LKM-A BMT Wira Artha Tani (Desa Wirokerten) dan LKM-A Sedyo Makmur (Desa Imogiri). Hal ini turut menyumbang kenaikan skor kinerja LKM-A sehingga berada pada rata-rata rentang kategori cukup baik.

Tabel 4. Hasil penilaian proses LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul tahun 2012

Tahun Berdiri LKM-A	Skor	Kategori
2008	15,12	Cukup Baik
2009	16,35	Cukup Baik
2010	17,24	Cukup Baik
Total Kinerja	16,11	Cukup Baik
Interval	(14,40-17,99)	

Berdasarkan penilaian kinerja proses terlihat peningkatan skor dari tahun ke tahun (Tabel 4), karena manajemen pembukuan LKM-A tahun 2009 dan 2010 sudah relatif baik walaupun sederhana. Peran penyuluh pendamping (PPL) dan Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam pembinaan dan pendampingan LKM-A juga menunjukkan pengaruh positif meskipun intensitasnya masih rendah. Pelaksanaan pelayanan LKM-A mengarah pada acuan dalam pedoman umum pengembangan LKM-A, meskipun dalam prakteknya didominasi oleh hasil kreativitas masing-masing pengelola LKM-A sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Kondisi tersebut mendukung peningkatan skor kinerja proses dari tahun ke tahun.

Penilaian kinerja output LKM-A dari tahun 2008 hingga 2010 cenderung semakin baik (Tabel 5). Penyaluran pinjaman sudah memperhatikan peruntukannya bagi pembiayaan sektor pertanian, meskipun sebanyak 70,77% LKM-A memiliki tingkat pinjaman bermasalah (NPL diatas 5%). Dengan NPL > 5%, menandakan sebagian besar LKM-A termasuk dalam kategori lembaga keuangan yang kurang sehat dengan kualitas portofolio yang rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian McIntosh *et al.* (2005) yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat pengembalian menyebabkan kualitas portofolio LKM rendah.

Penilaian kinerja *outcome* (Tabel 6) berada pada kategori kurang baik, namun dari sisi nilai skor cenderung mengalami peningkatan. Kinerja yang kurang ini disebabkan LKM-A (80%) belum dapat memiliki jaringan (*linkage*) dengan pihak ketiga dalam penguatan modal. Salah satu LKM-A yang telah berhasil membuat *linkage* dengan pihak

ketiga dalam bentuk kerjasama pembiayaan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Adil adalah LKM-A Sedyo Makmur di Desa Imogiri.

Menurut Salam (2007), *linkage* program hendaknya tidak hanya berkaitan dengan komponen modal, namun juga bimbingan teknis (*technical assistance*), seperti *training* pengelola dan pengadaan konsultan pendamping. Bimbingan teknis ini sangat membantu untuk meningkatkan kapasitas lembaga.

Tabel 5. Hasil penilaian output LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul tahun 2012

Tahun Berdiri LKM-A	Skor	Kategori
2008	6,88	Cukup Baik
2009	7,48	Cukup Baik
2010	8,41	Baik
Total Kinerja	7,49	Cukup Baik
Interval	(6,60-8,24)	

Tabel 6. Hasil penilaian *outcome* LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul tahun 2012

Tahun Berdiri LKM-A	Skor	Kategori
2008	1,60	Kurang Baik
2009	1,83	Kurang Baik
2010	1,82	Kurang Baik
Total Kinerja	1,74	Kurang Baik
Interval	(0-2,39)	

Hasil penilaian kinerja dampak (Tabel 7) menempatkan LKM-A pada kategori cukup baik. LKM-A mampu meningkatkan skala usaha dari pemanfaat pinjaman dan juga menumbuhkan usaha baru berbasis pertanian, seperti penjual sayur keliling, pengolahan hasil (telur asin, olahan jamur, pengolahan tepung *casava*, dan lainnya), dan kelompok ayam pedaging. Doocy *et al.* (2005) dalam penelitiannya menambahkan bahwa partisipasi anggota dalam pinjaman kredit mikro mengarah pada diversifikasi pendapatan dari penggunaan modal usaha yang berasal dari pinjaman. Dampak lainnya adalah adanya peningkatan lapangan kerja (menyerap tenaga

kerja) dari usaha peminjam yang telah berkembang, seperti usaha industri rumah tangga.

Tabel 7. Hasil penilaian dampak LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul tahun 2012

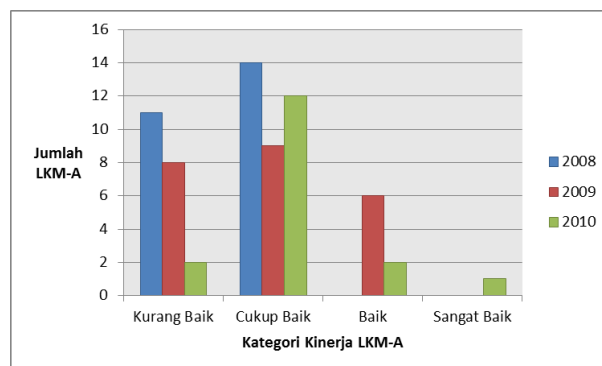
Tahun Berdiri LKM-A	Skor	Kategori
2008	2,84	Cukup Baik
2009	2,78	Cukup Baik
2010	2,88	Cukup Baik
Total Kinerja	2,83	Cukup Baik
Interval	(2,40-2,99)	

Berdasarkan keseluruhan penilaian kinerja LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul, terlihat bahwa LKM-A memiliki kinerja yang cukup baik dengan skor kinerja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tampaknya umur LKM-A mempengaruhi secara negatif terhadap kinerja LKM-A. Secara keseluruhan, skor kinerja tertinggi sebesar 47 pada LKM-A Desa Imogiri (tahun 2010) masuk dalam kategori sangat baik, sedangkan skor terendah sebesar 19 pada LKM-A Desa Wijirejo (tahun 2008) masuk dalam kategori kurang baik. Hasil penilaian itu sejalan dengan orientasi pengembangan LKM-A tahun 2010 yang sudah semakin fokus dan terarah.

Tabel 9. Hasil penilaian kinerja total LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul tahun 2012

Tahun Berdiri LKM-A	Skor	Kategori
2008	32,70	Cukup Baik
2009	35,44	Cukup Baik
2010	37,06	Cukup Baik
Total Kinerja	35,07	Cukup Baik
Interval	(32,40-40,49)	

Penilaian kinerja masing-masing LKM-A diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang didapatkan pada masing-masing LKM-A tersebut. Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa mayoritas LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul (53,85%) berada pada kategori kinerja cukup baik; 32,31% LKM-A masuk dalam kategori kurang baik; 12,31% LKM-A dalam kategori baik dan 1,54% LKM-A dalam kategori sangat baik.



Gambar 5. Hasil penilaian kinerja LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul berdasarkan tahun berdirinya

Jika dilihat berdasarkan tahun berdirinya, LKM-A tahun 2008 memiliki kinerja paling rendah karena masih merupakan tahun pertama yang diarahkan pada penumbuhan usaha produktif Gapoktan PUAP. LKM-A di tahun 2008 masih mencari bentuk dan belum terarah. Sementara itu, perkembangan kinerja LKM-A tahun 2009 dan 2010 cenderung lebih baik karena pola pembinaan dan pendampingan yang lebih terarah melalui sosialisasi, pelatihan bagi Gapoktan dan PMT selaku pendamping PUAP serta penyebaran panduan/pedoman umum pengembangan LKM-A yang lebih operasional.

Berdasarkan Gambar 5, kinerja LKM-A tersebar ke dalam empat kategori. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah diduga lebih dari 50% LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul mempunyai kinerja yang baik. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis pertama tersebut, dilakukan uji proporsi sebagai berikut:

$$Z_{hitung} = \frac{x/n - P_o}{\sqrt{\frac{P_o(1-P_o)}{n}}} = \frac{9/65 - 0,5}{\sqrt{\frac{0,5(1-0,5)}{65}}} = \frac{-0,362}{0,062} = -5,839$$

$$Z_{tabel} = 1,645 (\alpha = 5\%)$$

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh hasil Z_{hitung} sebesar $-5,839 < Z_{tabel}$ (1,645), sehingga H_o diterima, artinya kurang dari 50% LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul mempunyai

kinerja yang baik. Relatif rendahnya proporsi LKM-A yang kinerjanya baik di Kabupaten Bantul ini, ada kaitannya dengan pengelolaan atau manajemen LKM-A yang masih di bawah standar. Manajemen merupakan faktor penentu dalam keberlanjutan suatu lembaga keuangan mikro selain SDM pengelolanya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Lincoln yang dikutip Salam (2007) yang menyatakan bahwa peran tenaga pengelola adalah kunci dari berlanjutnya aktivitas sebuah lembaga keuangan mikro.

Secara keseluruhan, penilaian kinerja LKM-A tahun 2008, 2009 dan 2010 masuk dalam kategori cukup baik. Namun, dari 65 LKM-A yang disurvei terdapat satu LKM-A yang menonjol dan layak dijadikan LKM-A percontohan (*pilot project*), yaitu LKM-A Desa Imogiri yang berdiri sejak tahun 2010 dengan kategori penilaian sangat baik. Peningkatan kinerja LKM-A difokuskan pada persiapan input dan proses, karena memiliki pengaruh yang besar terhadap *output*, *outcome* dan dampak yang ditimbulkan. Persiapan SDM pengelola, sarana dan prasarana penunjang LKM-A, serta penumbuhan kesadaran nasabah adalah beberapa upaya yang perlu ditempuh guna meningkatkan kinerja LKM-A yang ada. Diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak baik pemerintah desa, daerah, pusat maupun pengambil kebijakan lainnya serta dukungan masyarakat pemanfaat pinjaman LKM-A demi pencapaian tujuan, keberhasilan dan keberlanjutan LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul.

Langkah Strategis Peningkatan Kinerja LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan pengurus LKM-A, terungkap bahwa kinerja LKM-A dipengaruhi oleh umur berdirinya LKM-A tersebut karena perbedaan orientasi dan fokus program. Perkembangan LKM-A pada tahun 2010 memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009. Lokasi yang strategis juga menentukan kinerja LKM-A berkembang lebih baik. LKM-A yang berada di sekitar pusat perekonomian (pasar) desa dan kecamatan memiliki banyak nasabah dan

perputaran pinjaman yang cepat. Latar belakang pendidikan formal pengelola LKM-A tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja LKM-A, namun pengalaman pengelola dapat menjadi nilai lebih bagi peningkatan kinerja LKM-A tersebut.

Langkah strategis untuk peningkatan kinerja LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul dapat dibagi dalam dua pendekatan, yaitu internal dan eksternal. Pendekatan internal menitikberatkan pada peningkatan SDM pengelola yang handal serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Caranya dapat ditempuh melalui dukungan pelatihan maupun magang bagi pengelola untuk mempersiapkan SDM yang mampu melayani dan melakukan pembukuan yang transparan dan akuntabel. Setelah itu, LKM-A diarahkan agar berbadan hukum dalam bentuk badan hukum koperasi sehingga LKM-A dapat menjalin *linkage* pembiayaan dengan pihak ketiga lainnya (lembaga keuangan lainnya). Dari penelitian Hermawan dan Andrianita (2012) juga terungkap bahwa penguatan modal merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas LKM-A. Penguatan modal, baik dalam bentuk hutang maupun ekuitas, dapat memperluas dan meningkatkan layanan lembaga keuangan tersebut (Janda *et al.*, 2011). Di samping penambahan modal (kerjasama pembiayaan) bagi LKM-A, namun dapat juga berupa pelatihan maupun magang bagi pengelola LKM-A juga diperlukan.

Pendekatan eksternal difokuskan pada nasabah dan pemerintah. Peningkatan kesadaran nasabah LKM-A perlu ditumbuhkan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet. Penerapan mekanisme insentif dan sanksi merupakan salah satu langkah strategis yang perlu diberlakukan oleh LKM-A. Selain itu, diperlukan pembinaan dan penguatan kelompok usaha baru untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan yang berguna bagi pelaku usaha tersebut.

Peran pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun para pengambil kebijakan lainnya adalah melakukan pembinaan dan pendampingan intensif, baik terhadap LKM-A maupun penerima manfaat LKM-A. Pengawasan yang rutin dan berkelanjutan

dalam pelaksanaan kegiatan LKM-A juga menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja LKM-A.

KESIMPULAN

Kinerja LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta periode 2008-2010, berdasarkan indikator *input*, proses, *output*, *outcome* dan dampak menunjukkan kinerja yang beragam dari tahun ke tahun.

Dari aspek *input*, kinerja LKM-A cenderung mengarah dari kurang baik ke cukup baik. Dari aspek proses tetap pada kinerja cukup baik. Berdasarkan aspek *output*, kinerja cenderung mengarah cukup baik ke baik, namun pada aspek *outcome* menunjukkan kinerja kurang baik, sedangkan pada aspek dampak menunjukkan kinerja cukup baik.

Oleh karena itu, penyempurnaan dan perbaikan pengelolaan LKM-A ke depan harus lebih difokuskan untuk menghasilkan *outcome* yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2006. Potensi lembaga keuangan mikro (LKM) dalam pembangunan ekonomi pedesaan dan kebijakan pengembangannya. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 4 No. 2, Juni 2006: 146-164.
- Badan PSDM Pertanian. 2010. Petunjuk Teknis Peningkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Dajan, A. 1996. Pengantar Metode Statistik Jilid II. Cetakan II LP3ES. Jakarta.
- Dewi, A. C. 2008. Pengaruh kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 10, No. 1, April 2008: 47-58.
- Doocy, S., D. Norell, S. Teffera, and G. Burnham. 2005. Outcomes of an Ethiopian microfinance program and management actions to improve services. *Journal of Microfinance* Vol. 7 No. 1: 79-95.
- Hendayana. R, dan S. Bustaman. 2007. Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/Semnas4Des07_MP_A_Rachmat.pdf [10 September] 2013.
- Hermawan, H. dan H. Andrianyta. 2012. Lembaga Keuangan mikro agribisnis: terobosan penguatan kelembagaan dan pembiayaan pertanian di pedesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 10 No. 2, Juni 2012: 143-158.
- Hofer, C. W. 1983. ROVA: A new measure for assesing organizational performance. In R. Lamb (Ed.), Vol. 2. New York: JAI Press.
- Janda, K., G. Rausser, and B. Svarovska. 2011. Can investment in microfinance funds improve risk-return characteristics of a portfolio. *Journal of International Money and Finance*, 30 (3): 507-515.
- Mahendri, I.G.A.P. 2009. Analisis Efektivitas Kredit Ternak Domba Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Penerima Kredit Di Kabupaten Bogor. Tesis. Tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Martowijoyo, S. 2002. Dampak pemberlakuan sistem bank perkreditan rakyat terhadap kinerja lembaga pedesaan. *Jurnal Ekonomi Rakyat*: 5.

- McIntosh, C., A. de Janvry dan E. Saoulet. 2005. How rising competition among microfinance institutions affect incumbent lenders. *The Economic Journal* 115: 987-1004.
- Pusat Pembiayaan Pertanian. 2010. PUAP: Program Strategis Kementerian Pertanian. Buletin PUAP Newsletter No.1 edisi Februari 2010. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Pusat Pembiayaan Pertanian. 2010. Modul Pengembangan LKM-A. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Salam, A. 2007. Keberlanjutan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Rangka Peningkatan Peran Keuangan Mikro Bagi Pemberdayaan Masyarakat. Disertasi. Tidak dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Suryahadi, A. 2007. Persyaratan dan Unsur-Unsur Evaluasi yang Baik dalam Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas dan Project Pro-Poor Planning And Budgeting (ADB TA 4762 INO).
- Widyanti, W. dan Sudarno S. 2007. Sistem Monitoring yang Efektif dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas dan Project Pro-Poor Planning And Budgeting (ADB TA 4762 INO).